

**SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai salah Satu persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

**FAUZIL AZIM
NIM. 57995**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

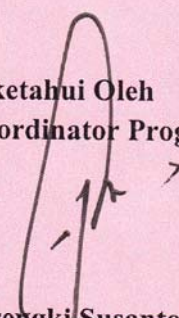
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

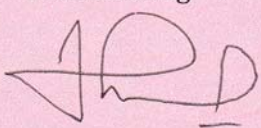
Nama : Fauzil Azim
NIM : 57995
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Diketahui Oleh
Koordinator Program Diploma III


Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP.19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh
Pembimbing

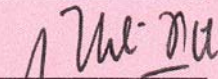

Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP.1919771123 200312 1003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Fauzil Azim
NIM : 57995
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2014
Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	
Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fauzil Azim
Tahun Masuk/NIM : 2010/57995
Tempat/Tanggal Lahir : Sintuk/31 Maret 1991
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik (ASP)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Angkasa Puri II, Tunggul Hitam, Kecamatan Nanggalo, Padang
Judul Tugas Akhir : Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku

Padang, Agustus 2014

Yang menyatakan,



Fauzil Azim
NIM. 57995

ABSTRAK

Fauzil Azim (2010) : Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat
Pembimbing : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dan bertujuan untuk deskripsi, gambaran lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki, selanjutnya dianalisis dengan kajian teori yang ada kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang ada. Penelitian ini dilakukan di Jl. Khatib Sulaiman No. 87, Kec Padang Utara, dalam waktu ± 1 bulan untuk melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas di DPRD Sumatera Barat telah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai dengan adanya akuntabilitas, publik, partisipasi, efisiensi dan efektifitas serta penekanan hukum yang sesuai dengan lingkungan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disarankan pimpinan dan staf agar dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja yang telah ada dan tetap konsisten dalam mengikuti peraturan yang berlaku dalam menerapkan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan judul “SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA BARAT”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis.

Terselesaikannya tugas akhir ini tentunya atas dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Henri Agustin, SE. M.Sc. Ak. selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Disamping itu, bantuan dari berbagai pihak sangat berperan dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan rasa penuh hormat, tulus dan ikhlas penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, beserta keluarga dengan segala pengorbananya yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, serta karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu di bidang administrasi.
5. Bapak Mansurdin B.Ac. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Ibu Zahranur Alamsyah S.H selaku Bendahara Pengeluaran dan Nurwan Hidayat A.Md selaku staf Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas akhir ini.
8. Dan teristimewa juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman DIII Akuntansi 2010 yang memberikan motivasi dan semangat serta masukan-masukan demi terwujudnya impian penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini memberi arti dan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Sistem Akuntansi.....	8
1. Pengertian Sistem Akuntansi	8
2. Tujuan Sistem Akuntansi	10
3. Fungsi Sistem Akuntansi	13
B. Penerimaan Kas.....	13
1. Pengertian Kas	13
2. Sumber-sumber Penerimaan Kas	15
3. Fungsi Penerimaan Kas.....	18
4. Prosedur Penerimaan Kas	18
C. Pengeluaran Kas	23
1. Prosedur Pengeluaran Kas	24
2. Fungsi Terkait	26
3. Dokumen yang Digunakan.....	26
4. Laporan yang Dihasilkan	27
5. Unsur-unsur Sistem Pengeluaran Kas.....	28

BAB III Pendekatan Penelitian

A.	Bentuk Penelitian Tugas Akhir.....	30
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C.	Rancangan Penelitian	31
1.	Jenis Penelitian.....	31
2.	Tahap Penelitian.....	32
3.	Objek Penelitian.....	33
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
5.	Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Intsansi	35
B.	Pembahasan	51
	Penerimaan Kas	51
1.	Sistem Penerimaan Kas.....	51
2.	Pihak-pihak yang Terkait	55
3.	Langkah-langkah Teknis.....	56
	Pengeluaran Kas	57
1.	Sistem Pengeluaran Kas.....	57
2.	Pihak-pihak yang Terkait	66
3.	Langkah-langkah Teknis.....	70

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Flowchart Sistem Akuntansi Penerimaan Kas	53
Flowchart Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas	59

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pernyataan Penelitian

Jurnal Bimbingan Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dan aparaturnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta melaksanakan tugas yang dibebankan rakyat kepadanya harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Pada hakikatnya tugas pemerintah yang penting adalah dalam hal pengurusan keuangan daerah yang mencakup seluruh bidang yang intinya merupakan hak dan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan daerah perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Suatu daerah tidak akan dapat menjalankan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran, oleh karena itu setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Dari perencanaan pembangunan ini pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena hal itu merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan di daerah. Kegagalan dalam membuat perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berarti kegagalan pemerintah daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan terhambatnya pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disusun. Jika melihat dari proses perencanaan yang dihubungkan dengan proses penganggaran maka dapat diketahui bahwa untuk memulai proses penyusunan anggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maka pemerintah

daerah mempedomani dokumen perencanaan yang telah dibuatnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mempedomani dokumen perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka akan memudahkan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ril daerah.

Selain itu jika mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya maka kecil kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan alokasi pendapatan daerahnya, karena salah satu pertimbangan daerah dalam penentuan perencanaan pembangunan (pengeluaran) daerah adalah sebagaimana tercantum pada bagian dari isi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu bagian yang menjelaskan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya.

Pada bagian tersebut pada umumnya menjelaskan hal-hal mengenai perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto, laju pertumbuhan ekonomi, kependudukan dan sumber-sumber pendanaan bagi realisasi atas perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan anggaran yang dimiliki daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks yang lebih sempit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sumber dana

dari segala kegiatan yang dilaksanakan (diselenggarakan) pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat daerah atau pengembangan dan pembangunan daerah. Dalam perkembangannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah dan nasional.

Krisis merupakan salah satu faktor yang mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penggunaannya. Penyelewengan pun juga tak lepas dari penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tindak Kecurangan banyak terjadi di kalangan pemerintah daerah dalam memanipulasi keadaan sehingga terjadi keadaan dimana dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semakin marak terjadi, ironisnya masyarakat banyak yang masih acuh tak acuh dan tak mau tahu terhadap hal tersebut.

Seiring dengan semakin berkembang dan semakin luasnya aktivitas setiap instansi dan departemen, baik pemerintah maupun swasta, sehingga masalah yang dihadapi pimpinan semakin rumit dan kompleks. Oleh sebab itu dalam instansi pemerintah diperlukan adanya suatu alat, cara-cara, sistem atau metode untuk membantu pimpinan dalam mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada pegawai dan staf.

Salah satu alat atau metode yang biasa digunakan untuk mengendalikan pencatatan kegiatan pemerintah adalah melalui sistem akuntansi. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan

secara keseluruhan. Adanya UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut. Oleh karena itu, sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi terdiri dari beberapa prosedur, contohnya adalah prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan dan pengeluaran kas merupakan salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian khusus bagi instansi. Dengan penerapan suatu sistem yang memadai maka pimpinan dapat memonitor adanya kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap kas yang diterima dan yang dikeluarkan instansi, sebagaimana yang telah terjadi pada kasus pada tahun sebelumnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu dalam kasus di DPRD Sumbar, uang penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan Pasal 14 PP No 110/ 2000 merupakan belanja

sekretariat, tapi para terdakwa telah mengaturnya sebagai anggaran DPRD dan digolongkan sebagai belanja DPRD.

Untuk itu perlu diterapkan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang baik agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini sebagai topik untuk pemikiran penulis dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagaimana siklus sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang dipakai di instansi pemerintahan, khususnya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

1. Sebagai bahan studi dalam pembuatan laporan yang merupakan syarat tugas akhir.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada instansi pemerintahan.

3. Untuk mengetahui siklus sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang dipakai pada instansi pemerintahan, khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti sendiri, menerapkan ilmu yang didapat dalam penelitian guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di jurusan Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
2. Menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam menangani dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan, khususnya tentang Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas di DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, menjalin hubungan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dengan instansi sebagai wadah penerapan ilmu bagi mahasiswanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwasanya dari hasil pembahasan yang telah dibuat penulis pada BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas telah mengikuti prosedur menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpres No.70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. Serta telah menerapkan siklus akuntansi yang sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian yaitu diharapkan kepada pimpinan dan staf yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja yang telah ada dan tetap konsisten dalam mengikuti peraturan yang berlaku dalam menerapkan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

Penulis menghimbau agar topik yang diangkat dalam karya tulis ini dapat dikaji lebih dalam dengan skala yang lebih besar, agar permasalahan terhadap penyelewengan kas tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan Zaki. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian Indra. 2006 *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Yogyakarta: BPFE
- Republik, Indonesia Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Penata Usaha Keuangan Daerah*.
- Republik, Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- Republik, Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintah Daerah*
- Mamesah D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Tim Fakultas Ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi. (2013). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Padang: FE UNP.